

TAJUK RENCANA

Keadilan untuk Korban Kanjuruhan

MAHKAMAH Agung banyak mendapat apresiasi dari pelbagai kalangan menyusul putusan kasasi yang membatalkan vonis bebas dalam tragedi Kanjuruhan. Dalam putusan kasasinya, MA menghukum eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan eks Kabag Ops Polres Malang Kumpul Wahyu Setyo Pranoto dengan hukuman masing-masing dua tahun dan dua setengah tahun penjara. Sebelumnya mereka divonis bebas oleh pengadilan tingkat pertama.

Sementara terdakwa lainnya telah divonis ringan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Hal inilah yang membuat masyarakat protes dan menggelar demo karena putusan dianggap tidak adil. Seperti diketahui, dalam tragedi Kanjuruhan, 135 orang meninggal karena kehabisan oksigen setelah polisi menembakkan gas air mata. Namun, dalam kaca masyarakat, tak ada terdakwa yang dihukum sepadan atas tindakannya.

Itulah mengapa putusan MA yang menganulir vonis bebas terhadap AKP Bambang Sidik Achmadi dan Kumpul Wahyu Setyo Pranoto diapresiasi banyak pihak. Agaknya, MA mempertimbangkan masukan Komnas HAM yang secara resmi memberikan pendapat atau omicus curiae yang diserahkan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Pendapat tersebut yakni, agar pengadilan menghukum para terdakwa secara adil, serta mendorong MA mencanangkan restitusi dan kompensasi kepada keluarga korban.

Seperti diketahui, omicus curiae adalah pendapat hukum yang disampaikan pihak ketiga, dalam hal ini Komnas HAM, yang berkepentingan atas suatu perkara, di luar para pihak di pengadilan, sebatas opini dan bukan sebagai bentuk

perlawanan. Atas hal tersebut, pengadilan mempertimbangkannya sebagai masukan dalam pengambilan keputusan.

Secara yuridis hakim memang tidak terikat pada omicus curiae, karena dalam menjalankan tugasnya hakim independen, tidak dapat diintervensi pihak manapun. Namun, paling tidak, pendapat hukum Komnas HAM bisa menjadi pertimbangan dalam memutus perkara, termasuk kasus Kanjuruhan. Secara normatif, hakim harus menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hemat kita, vonis MA yang menganulir putusan pengadilan di bawahnya dengan mempertimbangkan omicus curiae dari Komnas HAM kiranya menjadi preseden yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Komnas HAM boleh dikatakan merepresentasikan suara hati masyarakat yang haus akan terwujudnya keadilan.

Namun, tentu ini belum usai, karena masih ada agenda penting yang mestinya tercantum dalam putusan, yakni pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban atau keluarganya. Restitusi atau ganti rugi sebenarnya lazim dalam penegakan hukum sebagai upaya untuk meringankan penderitaan korban atau keluarganya.

Mereka yang selamat dari Tragedi Kanjuruhan butuh pendampingan dan rehabilitasi agar kondisinya pulih. Belum lagi, mereka yang kehilangan pekerjaan akibat tragedi tersebut, butuh pertolongan. Sedang terkait korban yang meninggal, selain mendapat santunan juga pendampingan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita sepakat, Tragedi Kanjuruhan adalah peristiwa penting yang tak boleh dilupakan, melainkan harus menjadi pelajaran berharga agar tak terulang di kemudian hari. □-f

'Sustainability' dan 'Walkability' di Yogyakarta

Fuad Rakhman

SALAH satu kesalahan peradaban dalam satu abad terakhir adalah menyerahkan terlalu banyak ruang publik kepada kendaraan bermotor. Ini terjadi di berbagai kota di dunia yang mengakibatkan dampak kemanusiaan dan lingkungan yang sangat besar, termasuk di Indonesia.

Salah satu karakteristik kota yang baik, apalagi destinasi wisata seperti DIY, memiliki *walkability* yang tinggi. *Walkability* adalah kemungkinan tempat-tempat di suatu kota atau daerah bisa diakses dan dijelajahi secara aman dan nyaman dengan berjalan kaki.

Sayangnya daerah-daerah di DIY tidak terlalu aman dan nyaman dinikmati dengan berjalan kaki, sehingga sering pejalan kaki, wisatawan, bahkan wisatawan asing harus mengambil risiko berjalan di badan jalan karena tidak tersedia trotoar (*sidewalk*), atau trotoar yang tidak bisa dilalui karena terhalang pedagang atau lainnya. Ini tidak memenuhi standar bagi sebuah kota pariwisata tingkat dunia dan bisa menjadi cerita buruk di antara wisatawan internasional. Sebagai daerah wisata, DIY bisa mulai berbenah dalam memperbaiki *walkability*.

Namun sebenarnya *walkability* tidak hanya terkait kenyamanan berwisata, yang lebih penting terkait isu keterlanjutan (*sustainability*). Bencana kemanusiaan dan lingkungan yang terjadi di berbagai belahan di dunia karena praktik korporasi yang tidak *sustainable* dengan mementingkan *profit* dan mengabaikan aspek *people* dan *planet*. Di ranah publik, ini terjadi karena pemerintah daerah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek lain seperti kenyamanan pengguna jalan dan kualitas lingkungan.

Jalan di DIY yang kurang atau bahkan tidak *walkable* memiliki implikasi sangat luas. Pertama, karena ku-

rang nyaman untuk berjalan, masyarakat lebih memilih berkendara motor meski untuk jarak dekat (*walking distance*). Ini sebuah kebiasaan buruk. Juga menciptakan lingkaran setan, karena bertambahnya jumlah kendaraan menyita akses pejalan kaki, sehingga orang yang biasanya berjalan kaki terpaksa berkendara demi kenyamanan, terutama keselamatan hidupnya.

Kedua, kualitas lingkungan menurun



restoran dalam perjalanannya daripada pemotor.

Kedua, masyarakat di daerah dengan *walkability* tinggi lebih sehat dari mereka yang tinggal di lokasi kurang *walkable*. Banyak masalah kesehatan yang bisa dihindari dengan rutin berjalan kaki, termasuk masalah fisik dan mental. Bahkan dokter di zaman kuno, Hippocrates, mengatakan, berjalan obat paling mujarab.

Ketiga, daerah dengan *walkability* baik akan meningkatkan interaksi sosial masyarakat. Riset menunjukkan, orang yang hobi berjalan lebih aktif secara sosial daripada yang tidak terbiasa berjalan. Keempat, kebiasaan berjalan meningkatkan kreativitas dan kemungkinan munculnya ide-ide cemerlang. Filosof Henry David Thoreau mengatakan, ketika kakinya mulai melangkah, ide-ide mulai mengalir dalam pikirannya. Bahkan ahli matematika Sir William Rowan Hamilton mendapat inspirasi menyelesaikan rumus *complex number* saat berjalan kaki.

DIY bisa belajar dari kota-kota wisata di dunia untuk mengambil kembali jalanan dari kendaraan bermotor, sebelum kian terlambat. Penataan kota yang sudah dilakukan di kawasan Malioboro dengan mengembalikan ruang publik kepada pejalan kaki merupakan model yang bisa diterapkan dalam skala lebih besar. □-f

*) **Fuad Rakhman PhD**, Pengajar dan Peneliti di FEB UGM.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Merdeka Belajar vs Manusia Merdeka

Adam Surya Ananta

PROGRAM Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menuai kontroversi sejak diluncurkan tahun 2020. Tak sedikit akademisi, mahasiswa, pemerhati pendidikan, dan kalangan lainnya yang mengkritisi atau bahkan menolok kebijakan ini. Opini dan kritisi terus mengalir untuk mempertanyakan tujuan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam tingkat universitas hendak diarahkan ke mana.

Alih-alih memerdekakan mahasiswa untuk berinovasi dalam pembelajaran melalui "merdeka belajar" yang menjadi fokus utama, MBKM telah mereorientasi pendidikan akademik menjadi pendidikan yang bermuatan vokasional. Proses pendidikan mengalami perubahan paradigma menjadi sekadar persoalan kejuruan untuk menciptakan manusia siap kerja. Hal ini berimplikasi terhadap marginalisasi daya intelektual dan sikap kritis mahasiswa. Padahal, salah satu kapabilitas yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menghadapi perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) adalah dengan memiliki daya kritis dan analisis yang tajam.

Pada masa perkembangan kecerdasan buatan yang masif saat ini, kompetensi mahasiswa untuk menjawab pertanyaan atau persoalan menjadi tidak relevan. Produk kecerdasan buatan seperti ChatGPT dinilai lebih canggih dan efisien daripada manusia untuk menjawab suatu pertanyaan. Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk bertanya lebih baik daripada sekadar menjawab. Kemampuan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, butuh olah pikir yang kritis dan analisis

mendalam untuk menghasilkan pertanyaan yang berkualitas terhadap suatu permasalahan dalam sebuah realitas.

Berbagai program MBKM yang dapat dipilih mahasiswa seperti praktik kerja atau magang, kegiatan kewirausahaan, dan lain sebagainya berorientasi untuk menciptakan manusia berkompotensi kerja. Hal tersebut merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang cenderung berasosiasi dengan upaya mencetak tenaga kerja siap pakai. Padahal, pengembangan sumber daya manusia harusnya berfokus untuk membentuk manusia merdeka dalam konsep pendidikan merdeka.

Dalam sistem pendidikan merdeka yang digagas Ki Hajar Dewantara, fungsi pendidikan tidak sekadar menjadi wahana pewarisan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Pendidikan juga sebagai bentuk usaha untuk mencerdaskan jiwa pelajar menurut kodrat individualitas masing-masing. Pendidikan harus dimaknai sebagai pendidikan budi pekerti yang mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan, tekad-kemauan manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat melahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar, dan indah.

Program MBKM belum mendukung visi pengembangan kapabilitas diri sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan yang bernilai atau meraih kondisi yang bernilai dengan men-

gaktualisasikan potensi dan kompetensi diri masing-masing. Program ini justru mereduksi dan menyempitkan makna kompetensi diri menjadi kompetensi kerja untuk memberikan dampak positif bagi pasar ketenagakerjaan. Mahasiswa diarahkan untuk siap mengabdikan kepada korporasi atau perusahaan setelah lulus kuliah.

Merdeka belajar dalam konteks Program MBKM perlu dievaluasi dan dibenahi tata pelaksanaannya secara holistik. Merdeka belajar perlu diselaraskan makna dan visinya dengan pendidikan merdeka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Apabila keselarasan antara kedua hal tersebut bisa diwujudkan, menciptakan manusia yang merdeka bukanlah suatu utopis. □-f

*) **Adam Surya Ananta**, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pojok KR

Menko PMK wacanakan larangan berhaji lebih dari satu kali.

-- **Tepatnya, prioritaskan yang belum berhaji.**

Dukung Prabowo, Budiman terima pemecatan dari PDIP.

-- **Pilihannya, menjomblo atau gabung partai lain.**

Buang sampah sembarangan, bakal dikenai sanksi.

-- **Tidak buang sampah, undang penyakit.**

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

✉ pikiranpembaca@gmail.com ☎ 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Lestarkan Dongeng yang Bermanfaat

BICARA mengenai dongeng, tentu ingatan kita di masa kecil adalah sosok hewan Kancil yang suka mencuri Timun. Namun sebenarnya, banyak dongeng yang mampu memberi semangat kreativitas dan motivasi anak-anak.

Beberapa dongeng tentang petualangan atau tokoh-tokoh yang sukses dapat menginspirasi anak-anak sendiri dan mengejar karier atau tujuan hidup. Dongeng sering kali mengandung pesan moral atau

pelajaran tentang nilai-nilai seperti kebaikan, kejujuran, kerja sama, dan kebijaksanaan. Dongeng juga bisa mengajarkan anak-anak tentang interaksi sosial, bagaimana mengatasi konflik, dan bagaimana bekerja sama dalam tim. Karena itu gerakan seperti dilakukan Omah Dongeng Srikandi, yang melestarikan dongeng perlu didukung. □-f

*) **Emilia Suhartini MSI**, Kragilan, Sinduadi Sleman.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).